

## ABSTRACT

JUDUL : Framing Analysis of Beef Import Quota Bribery Case in Partai Keadilan Sejahtera (PKS) within The Koran Tempo  
NAMA : HANI FAURIZKA  
NIM : D2C009005

---

The mass media always saw political issues as an attractive publicity and also something with a high news value. In several recent years, news reports in Indonesia has always marred by many Indonesian political elites allegations of bribery cases. One of several authority and power abuse cases by cadres of political parties in Indonesia were the suspected fund bribery of beef imports quota in Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Media reporting activities in political cases made them involved in making of political discourse. Media wasn't act as news courier only but they act as political agent also, they do framing the message for making up issues, and Koran Tempo is on the list with all of its interest attribute within this case.

This was descriptive research with framing analysis approach developed by Robert N. Enmant. This research was conducted to determine the frame formed by Koran Tempo in every their news about the bribery case of beef import quotas that occurred in PKS.

Result of this study indicated that the Koran Tempo news was dominated by “*news maker*” frame pattern. Tempo tried to form a view that the names of PKS leaders who are involved in cases is seen as a mistake. The non-PKS resource persons been chosen to corroborate the indications statements of the names of this Islamic-based party leaders involvement. Legal system and the KPK's process of investigation considered as the only right way to solve the problem. In the end, Koran Tempo is clearly not a neutral media. Koran Tempo's news keep the journalists subjectivity that is based on an ideology as a critical and courageous media in their every news publication.

**Key words** : *Political party, Bribery case, Koran Tempo*

## ABSTRAK

JUDUL : Analisis Framing Kasus Suap Kuota Impor Daging Sapi Di Partai KeadilanSejahtera (PKS) Dalam Koran Tempo  
NAMA : HANI FAURIZKA  
NIM : D2C009005

---

Media massa selalu melihat persoalan politik sebagai bahan pemberitaan yang menarik dan memiliki nilai berita yang tinggi. Beberapa tahun terakhir pemberitaan di Indonesia selalu diwarnai oleh dugaan kasus suap yang banyak menimpa elite partai politik. Salah satu kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh kader-kader partai politik di Indonesia adalah adanya dugaan dana suap kuota impor daging sapi yang mengalir di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Aktivitas media dalam melaporkan peristiwa-peristiwa politik membuat media seringkali terlibat dalam pembuatan wacana politik. Media tidak hanya bertindak sebagai penyalur pesan melainkan juga sebagai agen politik yang melakukan proses pembingkai pesan untuk mengkonstruksi sebuah isu, tak terkecuali Koran Tempo dengan segala atribut kepentingannya dalam menyoroti kasus ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Enmant. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *frame* yang dibentuk oleh Koran Tempo dalam setiap pemberitaannya mengenai kasus suap kuota impor daging sapi yang terjadi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan Tempo di dominasi oleh pola bingkai *News maker*. Tempo mencoba membentuk konstruksi bahwa nama-nama petinggi PKS yang terlibat dipandang sebagai suatu hal yang salah. Pemilihan narasumber *non*-PKS dipilih Tempo untuk menguatkan keterangan adanya indikasi keterlibatan nama-nama petinggi partai berbasis Islam tersebut. Jalur hukum serta proses penyidikan KPK dianggap sebagai satu-satunya cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Pada akhirnya jelas Tempo bukanlah media yang netral. Pemberitaan Tempo menyimpan subjektivitas wartawan yang dilandasi oleh ideologi sebagai media cetak yang kritis dan berani dalam setiap menurunkan berita kepada pembacanya.

**Key words** : *Partai politik, Praktik suap, Koran Tempo*

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia seakan – akan menjadi suatu budaya yang tidak bisa dihilangkan sejak zaman orde baru dan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi pada tatanan pemerintahan. Korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi mendeduk keuntungan pribadi, dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri.

Salah satu bentuk tindak korupsi yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan adalah masalah suap. Berbagai bentuk praktik korupsi suap menyuap banyak terjadi di lingkungan pejabat birokrasi pemerintah ataupun lembaga publik yang pelaksanaannya bersentuhan dengan masyarakat, tak terkecuali partai politik. Jika dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa terdapat tiga fungsi umum sebuah partai politik, yaitu (1) melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan/ perwakilan rakyat; dan (3) mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Namun setelah melihat kasus-kasus diatas, bisa disimpulkan bahwa terjadi disfungsi dari keberadaan partai politik di Indonesia. Demokrasi partai dalam mencetak kader-kader partai yang bersih sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat, seakan jauh dari kata ideal. Elite partai banyak yang menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk

memperkaya kepentingan pribadi, yakni terlibat dalam praktik korupsi seperti pencucian uang maupun suap.

Dari sekian banyak isu kasus suap yang melibatkan para elite partai politik di Indonesia, peneliti tertarik pada kasus aliran dana suap penambahan kuota impor daging sapi PT. Indoguna Utama yang mengalir di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kasus ini terkuak sejak tertangkapnya sosok Ahmad Fathanah di hotel Le Meridien pada dini hari tanggal 29 Januari 2013, yang kemudian menyeret nama kader sekaligus mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, serta petinggi PKS lainnya untuk turut berurusan dengan KPK.

Pada kasus dugaan suap impor daging sapi ini, Luthfi Hasan Ishaq dan Fathanah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua bos PT. Indoguna Utama (perusahaan pengimpor daging) yaitu Juard Effendi dan Arya Abadi Effendy. Selain sebagai presiden PKS kala itu, Luthfi juga tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2009-2014. Ia duduk di Komisi I. Sebagai anggota Komisi I, Luthfi hanya bertugas dalam urusan soal komunikasi, informasi, keamanan, dan pertahanan. Urusan peternakan dan impor daging menjadi ranah Komisi IV dan Komisi VI. Dugaan keterlibatan Luthfi dalam kasus ini adalah, ia diduga "menjual" otoritas yang dimilikinya untuk memengaruhi kebijakan soal kuota impor daging. Sebagai petinggi PKS, ia memiliki pengaruh yang besar. Kuota impor daging sapi menjadi kewenangan Kementerian Pertanian, di mana menteri yang menjabat, Suswono, adalah kader PKS. Dari beberapa hasil penyidikan KPK, Luthfi pun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap kuota impor daging sapi atas hubungannya dengan Suswono, kader PKS yang menjabat sebagai Menteri Pertanian tersebut.

Keterlibatan Luthfi Hasan Ishaq dalam memanfaatkan jabatan/posisinya untuk berhubungan dengan Mentan Suswono melatarbelakangi penetapan statusnya sebagai

tersangka suap, dimana melanggar pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.

Dari awal tertangkapnya Ahmad Fathanah hingga ditetapkannya Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka pencucian uang, berbagai media massa berbondong-bondong menyajikan laporan berita ter-*update* untuk mengulas kasus ini. Salah satu jenis media massa adalah media massa cetak yang disebut surat kabar atau koran. Dua nama surat kabar nasional di Indonesia yang tak luput mengulas perkembangan kasus suap daging impor di PKS adalah Kompas dan Tempo. Dalam kurun waktu selama kurang lebih 5 bulan, yaitu dari tanggal 31 Januari hingga 30 Mei, pemberitaan mengenai kasus ini masih dibahas dalam kedua surat kabar tersebut. Untuk lebih jelas melihat ragam berita yang dihadirkan oleh Kompas dan Tempo mengenai kasus suap di PKS edisi 31 Januari – 30 Mei 2013, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.1**

**Perbandingan jumlah ragam berita dalam surat kabar Kompas dan Tempo edisi 31 Januari – 30 Mei 2013**

Ragam Berita	Media	
	Kompas	Tempo
Headline	8 judul	25 judul
Berita Utama	-	52 judul
Nasional	-	25 judul
Politik dan Hukum	35 judul	-
Skandal Suap Guncang PKS	-	15 judul
Jumlah Berita	43 judul	117 judul

*Keterangan: rincian pada lampiran*

Terkait dengan berita kasus suap di PKS ini, Tempo menurunkan 25 judul headline pada halaman cover surat kabar, dibandingkan dengan Kompas yang hanya 8

judul headline. Mengingat pentingnya kedudukan sebuah Headline dalam surat kabar, dimana sangat mempengaruhi pembaca dimana memudahkan dalam mengetahui perkembangan kasus yang terjadi serta menumbuhkan motivasi, mendorong dan mengembangkan pola pikir bagi masyarakat untuk semakin kritis dan selektif dalam menyikapi berita-berita yang disajikan pada berbagai media cetak yang ada di masyarakat.

Perbedaan penyampaian suatu berita di berbagai media juga dipengaruhi oleh latar belakang seorang wartawan dari media yang bersangkutan. Dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia dalam Undang-Undang Pers, pasal 1 disebutkan bahwa : “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Namun saat ini, seiring perkembangan pers serta kebebasan wartawan dalam menghasilkan berita tak sedikit ditemukan berita-berita yang dinilai tidak berimbang sesuai dengan ketentuan kode etik jurnalistik. Bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah berita akan dinilai apa adanya. Berita akan dipandang sebagai barang suci yang penuh dengan objektivitas. Namun, berbeda dengan kalangan tertentu yang memahami betul gerak pers. Mereka akan menilai lebih terhadap pemberitaan, yaitu dalam setiap penelitian berita menyimpan ideology dan campur tangan wartawan. Seorang wartawan pasti akan memasukkan ide-ide mereka dalam analisis terhadap data-data yang diperoleh dilapangan.

Dalam kasus yang diangkat ini dapat tersaji dengan jelas, bagaimana media massa menggambarkan identitas para actor yang menjadi sorotan utama mendominasi teks (profil) yang menjadi sorotan. Adanya proses seleksi isu dan penekanan pada isi berita yang dianggap layak ditampilkan, dipengaruhi juga oleh persepsi wartawan, yang jelas sangat beragam. Interpretasi sangat dilandasi dengan kepentingan masing-

masing media massa tak terkecuali Koran Tempo dalam pemberitaannya seputar kasus suap impor daging sapi yang melibatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

### **B. Permasalahan**

Bagaimana majalah Tempo membingkai berita tentang kasus suap daging sapi impor yang melibatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ?

## PEMBAHASAN

Berdasarkan data empirik penelitian, sejak kasus ini terkuak, Tempo tercatat menurunkan 25 judul headline mengenai kasus suap kuota impor daging sapi. Namun penelitian ini hanya merujuk pada 10 judul headline pada tanggal 10 Mei hingga 30 Mei 2013, dimana dalam periode tersebut pembahasan berita kasus suap impor daging sapi yang terjadi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih terfokus, serta menjadi cover pemberitaan paling banyak. Dengan menggunakan perangkat *framing* Entman, akan diketahui bagaimana pembingkai yang dilakukan Tempo terhadap kasus suap kuota impor daging sapi yang terjadi di PKS. Berikut penjabarannya :

*Define Problems* atau pendefinisian masalah. Dalam membahas masalah kasus suap kuota impor daging sapi di PKS ini, 10 berita yang diturunkan oleh Tempo hampir sebagian besar terfokus pada framing pola bingkai *News Maker/Public Figure*, berita-berita yang disajikan selalu terkait dengan nama-nama besar petinggi PKS yang terlibat didalamnya.

Tercatat dari 10 berita tersebut, ada 9 berita menggunakan pola bingkai *News Maker*. Terlihat disini bagaimana Tempo mencoba untuk memberikan gambaran bahwa kasus yang menyeret nama orang-orang penting, orang-orang terkemuka, lembaga penting, menjadi salah satu hal yang menarik untuk dijadikan berita. Dalam hal ini baik itu petinggi partai, menteri dan lembaga tinggi negara yang bersentuhan dengan kasus hukum mau tak mau akan ditindak lanjuti pula berdasarkan hukum yang berlaku.

*Diagnose Causes* atau memperkirakan penyebab masalah. Dalam memberitakan tentang kasus suap kuota impor daging sapi yang terjadi di PKS ini secara tidak langsung tampak bahwa Tempo menganggap bahwa kesaksian sumber berita di luar

PKS menjadi penyebab masalah dalam kisruh yang melibatkan nama-nama petinggi partainya dan lembaganya itu sendiri. Disini tampak bagaimana Tempo berusaha menyudutkan pihak PKS dengan dengan keterangan-keterangan sumber di luar PKS yang sebagian besar mengungkapkan fakta adanya keterlibatan para petinggi PKS dalam kasus suap kuota impor daging sapi.

*Make Moral Judgement* atau membuat keputusan moral. Menanggapi kasus suap impor daging yang yang melibatkan para petinggi Partai Keadilan Sejahtera ini, ada 5 evaluasi moral yang diberikan oleh Tempo: *pertama*, keterlibatan para petinggi PKS dinilai salah karena tugas dan wewenang mereka dalam struktur kepartaian tidak ada hubungannya dengan kasus penambahan kuota impor daging sapi. Kedua, status hukum Suswono dalam kasus impor daging masih sebatas saksi atas dua tersangka sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaq dan Fathanah . Ketiga, benda-benda yang terkait dengan aliran dana dari Fathanah dikategorikan sebagai hasil pencucian uang dan tindak suap. Keempat, KPK dinilai lamban dalam memproses status hukum dan melakukan pemeriksaan terhadap para petinggi PKS yang terlibat. Kelima, laporan PKS atas KPK termasuk dalam upaya mengkriminalkan KPK, alasannya karena PKS melaporkan KPK dengan pasal pidana, yakni pencemaran nama baik.

Kemudian dalam *Treatment recommendation*, menurut Tempo rekomendasi yang bisa dilakukan dalam menghadapi kisruh kasus suap kuota impor daging sapi yang terjadi di PKS ini adalah dengan menyerahkan proses dan penyelidikan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tempo menggarisbawahi bahwa semua petinggi PKS yang terlibat kasus ini harus di sikapi secara serius, salah satunya dengan penyelidikan dan pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Koran Tempo melihat bahwa penyelidikan yang dilakukan pihak KPK merupakan suatu cara agar masyarakat melihat bahwa segala bentuk praktik korupsi yang

dilakukan elite parpol adalah masalah yang serius dan harus ditangani oleh lembaga yang berwenang.

Dari keseluruhan pemberitaan yang di munculkan, Tempo mencoba mengarahkan *opini public* bahwa kasus suap impor daging yang terjadi di PKS ini dianggap salah dan melanggar ketentuan hukum sehingga pantas untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tempo juga menggunakan menggunakan gaya bahasanya cenderung lebih berani. Apalagi, jenis berita yang disampaikan berupa isu yang sensitif. Keberanian dalam menulis berita yang sensitif itu diikuti dengan kreativitas dalam mengolah berita menjadi sesuatu yang menarik atensi pembaca.

# PENUTUP

## Kesimpulan

Melalui hasil analisis dengan menggunakan perangkat *framing* Robert N. Enmant, penulis telah menemukan pola bingkai (*frame*) yang digunakan oleh Tempo dalam kasus suap kuota impor daging sapi yang terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam periode 10-30 Mei 2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberitaan Tempo didominasi oleh pola bingkai *News maker*. Nilai berita *News maker* pada pemberitaan Tempo mendapat porsi yang lebih besar dibandingkan nilai berita konflik.

Tempo menilai bahwa nama-nama petinggi PKS yang terlibat dalam kasus ini penting dan layak dijadikan berita, hal ini sesuai dengan teori jurnalistik yang menyebutkan bahwa nama selalu menciptakan berita (*names make news*). Teori tersebut dapat dianalogikan dengan pernyataan bahwa segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan oleh orang-orang penting selalu dikutip oleh media dan menjadi berita, sekalipun hal itu bersifat negatif.

Tempo mencoba mengkonstruksikan bahwa petinggi PKS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi, baik dalam bentuk suap maupun pencucian uang, merupakan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dan kedudukan karena tidak seharusnya figur yang menjadi panutan dalam partai terlibat dalam sebuah kasus. Hal ini dipandang oleh Tempo sebagai suatu kesalahan, dan jalur hukum menjadi satu-satunya cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah.

Sikap Tempo tersebut juga didukung dengan pemilihan narasumber yang digunakan dalam pemberitaan. Mayoritas sumber berita yang ditampilkan Tempo adalah pihak-pihak *non*-PKS. Kesaksian sumber berita tersebut cenderung

membenarkan fakta keterlibatan para petinggi PKS dalam kasus suap impor daging. Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Tempo bukanlah media yang netral dalam mengkonstruksikan suatu isu. Pemberitaan Tempo menyimpan subyektivitas wartawan yang dilandasi oleh ideologi sebagai media cetak yang kritis dan berani dalam setiap menurunkan berita kepada pembacanya.

## Daftar Pustaka

### Referensi Buku

- Ardianto, Elvinaro., Erdinaya., Komala, Lukiati. (2004). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya
- Bungin, Burhan. (2008). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Chaer, Abdul. (2010). *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. London: SAGE Publications
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Diterjemahkan oleh Dariyanto dkk dengan judul *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Effendy, Onong Uchjana. (2005). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara
- Eriyanto. (2007). *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta : PT. LKiS Yogyakarta.
- Junaedhi, Kurniawan. (1995). *Rahasia Dapur Majalah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit
- Moleong, J. Lexy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Rahardi, Kunjana. (2011). *Bahasa Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Rolnicky, Tom. E, C. Dow Tate, Sherri A Taylor. (2008). *Pengantar Dasar Jurnalisme (Scholastic Journalism)*. Jakarta: Kencana
- Sobur, Alex. (2005). *Analisis Teks Media Massa, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Steelw, Janet E. (2007). *Wars within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia*. Jakarta: PT Equinox Publishing Indonesia.
- Sudiby, Agus. (2001). *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: LkiS
- Suhandang, Kustadi. (2004). *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*. Bandung: Nuansa

- Sumadiria, Haris. (2006). *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Syah, Sirikit. (2011). *Rambu-Rambu Jurnalistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tamburaka, Apriadi. (2012). *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta : RajaGrafindo, Persada
- Wiryanto. ( 2005). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Graemeia Wiiasarana Indonesia.

### **Internet**

- Dwi Wedhaswary , Inggried. (2013). *Citra Partai Bersih PKS Tercoreng*. Dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/01/31/09280349/Citra.Partai.Bersih.PKS.Tercoreng>. Diunduh pada 3 Juni 2013 pukul 20.30 WIB
- Ruslan , Heri. (2013). *Presiden PKS Bantah Terima Suap Impor Daging*. Dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/01/31/mhgw0u-presiden-pks-bantah-terima-suap-impor-daging>. Diunduh pada 3 Juni 2013 pukul 21.00 WIB
- Suharman, Tri. (2013). *Presiden PKS Tersangka Suap Rp 1 Miliar*. Dalam <http://koran.tempo.co/konten/2013/01/31/299464/SKANDAL-IMPOR-DAGINGPresiden-PKS-Tersangka-Suap-Rp-1-Miliar>. Diunduh pada 3 Juni 2013 pukul 22.30 WIB
- Damanik, Caroline. (2013). *Sudah Ditahan KPK Emir Masih Berstatus Ketua Komisi XI DPR*. Dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/08/19/1222009/Sudah.Ditahan.KPK.Emir.Masih.Berstatus.Ketua.Komisi.XI.DPR>. Diunduh pada 16 Juli 2013 pukul 09.00 WIB
- Suharman, Tri. (2011). *Nazar Beberkan Peran Anas dan Angie di Kasus Hambalang*. Dalam <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/22/063373280/Nazar-Beberkan-Peran-Anas-dan-Angie-di-Kasus-Hambalang>. Diunduh pada 16 Juli 2013 pukul 10.30 WIB
- Kurniawam, Bahri. (2013). *ICW: Kader Golkar Paling Banyak Jadi Tersangka Korupsi*. Dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/10/04/icw-kader-golkar-paling-banyak-jadi-tersangka-korupsi>. Diunduh pada 16 Juli 2013 pukul 13.00 WIB
- Meisikalesaran. (2011). *Contoh Pelanggaran Kode Etik Pers*. Dalam <http://meisikalesaran.wordpress.com/2011/02/07/contoh-pelanggaran-kode-etik-pers/>. Diunduh pada 22 Juli 2013 pukul 20.00 WIB
- Blog Tempo Interaktif. (2007). *Cergas*. Dalam <http://blog.tempointeraktif.com/tempo/cergas/>. Diunduh pada 23 Juli 2013 pukul 21.00 WIB

- Dwi Wedhaswary, Inggried. (2013). *Luthfi Diduga Jual Pengaruhnya Untuk Atur Impor Daging*. Dalam <http://nasional.kompas.com/read/2013/01/31/15290283/Luthfi.Diduga.Jual.Pengaruhnya.untuk.Atur.Impor.Daging>. Diunduh pada 28 Juli 2013 pukul 10.00 WIB
- Alfiyah, Nur. (2013). *Luthfi Hasan Ishaq Tersangka Pencucian Uang*. Dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/26/078469527/Luthfi-Hasan-Ishaq-Tersangka-Pencucian-Uang>. Diunduh pada 29 Juli 2013 pukul 22.00 WIB
- Hendrawam, Parliza. (2013). *Demokrat dan PKS Dianggap Juara Korupsi*. Dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/19/078462351/Demokrat-dan-PKS-Dianggap-Juara-Korupsi>. Diunduh pada 29 Juli 2013 pukul 23.30 WIB